

# Ancaman Perdamaian di Venezuela Akibat Kemerostan Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Nicolas Maduro

Al Dina Maulidya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sinarmas Agribusiness and Food, Kalimantan Barat, Indonesia  
aldinamaulidya@gmail.com

## ABSTRAK

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan ancaman perdamaian di Venezuela, yang terjadi pada masa pemerintahan Nicolas Maduro. Urgensi dari penelitian ini ialah, adanya kemerostan demokrasi yang terjadi di Venezuela pasca sepeinggalan Chavez. Maduro merupakan presiden yang terpilih untuk menggantikan Chavez di tahun 2013. Ketidakstabilan politik dan ekonomi serta kemerostan demokrasi memungkinkan adanya ancaman perdamaian di Venezuela. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. *Kantian Triangle* yang merupakan bagian dari *democratic peace theory* milik Immanuel Kant, akan menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Dalam *Kantian Triangle* ditetapkan tiga faktor untuk dapat mencapai perdamaian, yakni: (1) sistem pemerintahan demokrasi, (2) adanya ketergantungan antar negara, dan (3) keterlibatan negara di dalam institusi internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan jika Venezuela tidak mampu memenuhi tiga faktor yang ada. Pertama, telah terkikisnya nilai-nilai demokrasi di negara tersebut. Kedua, ketergantungan dengan negara lain sulit terwujud. Hal ini dikarenakan kebijakan Maduro yang merugikan para investor dan banyaknya isu kemanusiaan di Venezuela. *Image* pemerintahan Maduro yang buruk menyulitkan terjalannya hubungan baik dengan negara lain. Ketiga, meskipun aktif di PBB, tetapi Venezuela terus melakukan pelanggaran peraturan dan prinsip-prinsip dari organisasi tersebut. Tidak terpenuhinya tiga faktor di dalam *Kantian Triangle* dapat memberikan ancaman perdamaian di Venezuela.

**Kata Kunci:** Ancaman Perdamaian, Kemerostan Demokrasi, Nicolas Maduro, Venezuela.

## ABSTRACT

*This paper aims to describe the threat to peace in Venezuela, which occurred during the reign of Nicolas Maduro. The urgency of this research is the deterioration of democracy that occurred in Venezuela after Chavez left. Maduro is the president who was elected to replace Chavez in 2013. Political and economic instability, as well as the decline of democracy, have posed a threat to peace in Venezuela. This research is a descriptive-qualitative study, with data using a library study. The Kantian triangle, which is part of Immanuel Kant's democratic peace theory, will be an analytical tool in this research. The Kantian Triangle determines three factors to achieve peace in democracy, namely: (1) democracy, (2) the existence of dependence between countries, and (3) state interactions in the international arena. The result of this research shows that Venezuela is not able to fulfill the three existing factors. First, the erosion of democratic values in the country. Second, dependence on other countries is difficult to materialize. This is because Maduro's policies are detrimental to investors, and the many humanitarian issues in Venezuela. The bad image of Maduro's government makes it difficult to maintain good relations with other countries. Third, although active in the United Nations, Venezuela continues to carry out the rules and principles of the organization. The failure to fulfill the three factors in the Kantian Triangle can pose a threat to peace in Venezuela.*

**Keywords:** Threat of Peace, Democratic Deterioration, Nicolas Maduro, Venezuela.

## Pendahuluan

Saat ini, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang digunakan oleh mayoritas negara di dunia.<sup>1</sup> Meskipun banyak diterapkan, tetapi dalam prosesnya ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran jalannya demokrasi. Untuk itu, terdapat lembaga yang menghitung indeks demokrasi negara-negara di dunia, salah satunya ialah *Freedom House*. Terdapat dua indikator utama, yang digunakan dalam mengukur indeks demokrasi suatu negara. Dua indikator utama tersebut ialah, *political rights* dan *civil liberties*. Selain *Freedom House*, terdapat juga *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Lembaga ini menetapkan lima kategori dalam penilaian, yakni: (1) proses elektoral dan

---

<sup>1</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 11.

pluralisme, (2) kebebasan sipil, (3) jalannya fungsi pemerintahan, (4) partisipasi politik, dan (5) budaya politik.<sup>2</sup> Indikator-indikator penilaian yang ada, digunakan untuk mengukur keberhasilan demokrasi yang diterapkan suatu negara.

Penilaian indeks demokrasi memungkinkan tersebarnya informasi secara global mengenai naik turunnya situasi demokrasi di suatu negara. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, Norwegia secara berturut-turut memegang peringkat pertama dalam indeks demokrasi yang dirilis oleh *Freedom House*.<sup>3</sup> Dari 100 poin yang ditetapkan, Norwegia memperoleh angka sempurna tanpa pernah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan jika demokrasi yang dianut oleh Norwegia dijalankan tanpa kendala. Pada saat bersamaan, terdapat pula negara dengan indeks demokrasi yang terus mengalami kemerosotan. Salah satu negara tersebut adalah Venezuela. *Freedom House* melalui analisisnya menyatakan jika institusi demokrasi di Venezuela telah memburuk sejak tahun 1999. Kekuasaan oleh eksekutif semakin menutup jalan kebebasan berbicara, membatasi kebebasan sipil, memperkuat korupsi, menghadirkan krisis kemanusiaan dan ekonomi, serta menendorong eksodus secara masal.<sup>4</sup>

Sebelum menghadapi kemerosotan demokrasi, Venezuela pernah menjadi negara terkaya di Kawasan Amerika Latin. Hal ini terjadi karena hingga akhir tahun 1990-an, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di kawasan tersebut. Pada tahun 1910, ditemukan ladang-ladang minyak yang kemudian diolah sehingga mampu menjadi sumber utama pendapatan Venezuela.<sup>5</sup> Sejak saat itu, pembangunan serta perekonomian negara ditopang dari hasil ekspor minyak. Keuntungan yang diraih dari kegiatan tersebut dipandang telah mencukupi kebutuhan negara. Oleh sebab itu, Venezuela kemudian kurang mengembangkan potensi dari Sumber Daya Alam (SDA) lain yang ada di negaranya. Cadangan minyak yang mereka miliki, tidak dikelola dengan baik dan tanpa adanya perencanaan serta strategi tertentu. Tanpa mereka sadari, hal ini mampu menjadi kelemahan dan menimbulkan masalah panjang di masa depan.

Tahun 1980-an menjadi awal kemunculan krisis di Venezuela. Krisis yang ada merupakan krisis pembangunan, yang juga melanda hampir seluruh negara-negara di Kawasan Amerika Latin.<sup>6</sup> Krisis yang melanda Venezuela di bawah kepemimpinan Carlos Andres Perez ini, ternyata memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat. Terdapat banyak gerakan-gerakan revolusi yang dilakukan pada masa itu. Melalui pemanfaatan cadangan minyak dan juga gerakan revolusi, Venezuela berhasil melewati krisis yang ada. Pemerintah menjanjikan demokrasi untuk memperbaiki keadaan. Masyarakat yang mulanya tidak puas dengan kepemimpinan saat itu, mulai kembali mempercayai pemerintah. Untuk sementara waktu, kehadiran cadangan minyak masih menjadi penguat bagi negara tersebut.

Pada tahun 1999, Hugo Chavez secara resmi memangku jabatan Presiden Venezuela. Sebelumnya, Chavez merupakan pemberontak yang melawan pemerintah di tahun 1992. Hingga kemudian ia membentuk partai politik berideologi sosialis, yang dijadikan alat untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) 1998.<sup>7</sup> Gaya kepemimpinan politik Chavez yang dicintai masyarakat, dipengaruhi oleh gagasannya terkait 'Revolusi Bolivarian'. Kata Bolivarian merujuk pada seorang pemimpin revolusioner, yang membebaskan negara-negara Amerika Latin. Melalui revolusi tersebut, ia mencoba mendengarkan serta menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain melalui revolusi, Chavez juga melakukan referendum konstitusi di akhir tahun 1999. Melalui persetujuan 71,78% suara rakyat, maka dibuatlah Magna Charta pertama yang disetujui rakyat dalam sejarah Venezuela.<sup>8</sup> Konstitusi 1999, menyebutkan jika Republik Bolivarian Venezuela menerapkan sistem demokrasi liberal multipartai, dan akan melaksanakan pemilu setiap 6 tahun sekali.

---

<sup>2</sup> Syurya Muhammad Nur, "Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia," 2019, 3.

<sup>3</sup> Freedom House, "Freedom in The World 2020: Norway," [freedomhouse.org](https://freedomhouse.org/country/norway/freedom-world/2020), 2020, <https://freedomhouse.org/country/norway/freedom-world/2020>.

<sup>4</sup> Freedom House, "Our Work in Venezuela," [freedomhouse.org](https://freedomhouse.org/country/venezuela), 2017, <https://freedomhouse.org/country/venezuela>.

<sup>5</sup> Krisna Purwa Adi Wibawa, "Pengaruh Ideologi Kiri Baru terhadap Perubahan Kebijakan Negara di Sektor Energi: Studi Kasus Venezuela," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2014): 295.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Amalia Safira Ashidiqi, "Pengaruh Idiosinkratik Nicolas Maduro Terhadap Penolakan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Dalam Krisis Venezuela," *Journal of International Relations* 6, no. 1 (2020): 136.

<sup>8</sup> Wibawa, "Pengaruh Ideologi Kiri Baru terhadap Perubahan Kebijakan Negara di Sektor Energi: Studi Kasus Venezuela," 303.

Chaves meninggal pada bulan Maret 2013, sehingga dilakukan pemilu untuk menggantikannya. Saat itu Nicolas Maduro yang merupakan kandidat, berkampanye dengan menjanjikan keberlanjutan revolusi milik Chavez.<sup>9</sup> Ia kemudian berhasil meraih kemenangan dan menjadi Presiden Venezuela. Pelantikan Maduro menjadi momentum penting dalam pergerakan kelompok oposisi di negara tersebut. Hal ini disebabkan, adanya ketidakpuasan oposisi dengan cara Maduro menangani krisis di Venezuela. Diketahui jika pada masa Chavez, krisis di tahun 1990-an berhasil di atasi dengan membuka jalur investasi asing di bidang *Hydrocarbon* dan Petrokimia.<sup>10</sup> Sebanyak 60 perusahaan dari 4 negara, tertarik untuk melakukan investasi. Chavez saat itu, berhasil menyelesaikan krisis dengan mengurangi ketergantungan dari ekspor minyak. Cara yang berbeda dilakukan oleh Maduro dalam menghadapi jatuhnya harga minyak di tahun 2013-2017. Pemerintah Venezuela mencetak banyak uang yang digunakan untuk membiayai anggaran pengeluaran negara, yang saat itu mengalami defisit. Hal ini kemudian menurunkan nilai tukar mata uang Bolivar, serta menyebabkan lonjakan inflasi akibat jatuhnya nilai mata uang. Kelangkaan bahan pangan yang juga menjadi masalah, membuat impor pangan di Venezuela meningkat. Bunga yang tinggi dari hutang luar negeri, semakin memperburuk keadaan Venezuela di masa pemerintahan Maduro.

Kegagalan Maduro dalam menghadirkan solusi penyelesaian dalam krisis di Venezuela, memicu ketidakpuasan dari banyak pihak. Pihak oposisi, masyarakat pendukung oposisi, masyarakat miskin Venezuela, dan mahasiswa menjadi kelompok anti-pemerintah serta menciptakan perselisihan. Aksi-aksi demonstrasi serta tindakan kekerasan pemerintah dalam menyelesaikannya, mengundang perhatian dunia terutama Amerika Serikat. Tahun 2014, atas dasar Undang-Undang HAM dan Masyarakat Sipil, Amerika Serikat memberikan sanksi untuk pemerintah Maduro.<sup>11</sup>

Berdasarkan indeks demokrasi yang ditetapkan EIU, kondisi demokrasi Venezuela mengalami kemunduran besar pada masa Pemerintahan Maduro.<sup>12</sup> EIU menggambarkan kondisi demokrasi suatu negara dengan skala 0 sampai 10. Sepanjang pemerintahan Chavez, EIU menetapkan indeks demokrasi Venezuela berada pada angka 5,42 ditahun 2006 dan 5,07 pada akhir pemerintahannya.<sup>13</sup> Angka tersebut menempatkan Venezuela ke dalam kelompok demokrasi Rezim Campuran, yakni negara yang memiliki kebebasan politik serta kebebasan sipil yang lemah. Sejak Maduro diangkat menjadi pemimpin, indeks demokrasi Venezuela merosot hingga diangka 2,76 di tahun 2020 atau termasuk ke dalam kelompok negara dengan jenis demokrasi Rezim Otoriter.<sup>14</sup> Menurut EIU, negara yang termasuk ke dalam kelompok tersebut telah kehilangan kebebasan politik, kebebasan sipil, hingga tidak adanya kebebasan pers yang sepenuhnya dikendalikan oleh negara.

Kemerossotan demokrasi dapat menjadi ancaman perdamaian. Menurut pandangan pendukung teori perdamaian demokratik, perdamaian berkaitan erat dengan keamanan.<sup>15</sup> Keamanan sendiri menurut kelompok tersebut dapat dibangun melalui pemerintahan demokrasi yang solid dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>16</sup> Apabila demokrasi di suatu negara telah melemah dan kehilangan fungsinya, maka konflik internal akan muncul sehingga menimbulkan hambatan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Hambatan tersebut menjadi potensi yang dapat membahayakan keutuhan wilayah, keamanan dan keberlangsungan suatu negara.<sup>17</sup> Dalam konteks hubungan internasional, definisi perdamaian buka hanya kondisi tidak adanya perang tetapi berkaitan dengan keadaan aman absolut yang terbentuk melalui persatuan ekonomi, pemahan sosial dan budaya.<sup>18</sup>

<sup>9</sup> Angel Alvarez, "Countries at the Crossroads 2011 - Venezuela," 2011.

<sup>10</sup> Hikmatul Akbar dan Luh Risma Sandiarti, "Aliansi Strategis Venezuela dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," 2018, 12.

<sup>11</sup> Matt Egan, "How US sanctions on Venezuela are Rippling Through Oil Markets," CNN Business, 19 Februari 2019, <https://edition.cnn.com/2019/02/19/investing/venezuela-oil-sanctions-pdvs/index.html>.

<sup>12</sup> Civicus Lens, "Venezuela's Opportunity for Democracy," 2024, <https://lens.civicus.org/venezuelas-opportunity-for-democracy/>.

<sup>13</sup> Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2023" (EIU, 14 Februari 2024), <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Yan Xuetong, "Defining Peace: Peace vs. Security," *The Korean Journal of Defense Analysis*, 05 2009, <https://doi.org/10.1080/10163270409464062>.

<sup>16</sup> Kevin Placek, "The Democratic Peace Theory," 02 2012, <https://www.e-ir.info/2012/02/18/the-democratic-peace-theory/>.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Iqbal Maulana Alfiansyah, Mohammad Latief, dan Naqia Salsabila Taslim, "Perpetual Peace: An Analysis of Kant's Theory of Peace in Terms of The Islamic Worldview," *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 121-36, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4871/>.

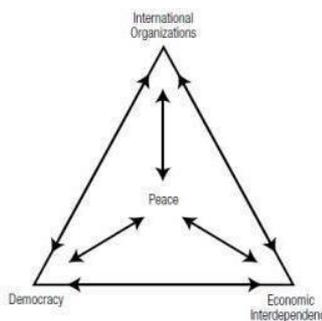
Dengan demikian, kondisi Venezuela pada masa pemerintahan Maduro di mana demokrasi mengalami kemerostan akan menjadi ancaman perdamaian yang menyulitkan terciptanya kondisi aman absolut dalam dunia internasional.

Sesuai penjabaran di atas, maka tujuan Penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kemerostan demokrasi, serta hadirnya ancaman perdamaian di masa pemerintahan Maduro. Eksistensi demokrasi di Venezuela semakin dipertanyakan. Maduro semakin berusaha menekan suara-suara dari pihak yang tidak menyukai pemerintahannya. Sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan, juga terus melakukan upaya yang dapat menggeser kedudukan Maduro. Demokrasi yang berjalan dengan baik, mampu menghadirkan keadaan damai. Sebaliknya, ketika demokrasi mengalami kemerostan maka memungkinkan adanya ancaman perdamaian. Untuk itu, kemerostan demokrasi di Venezuela menjadi bahasan yang menarik untuk dituliskan. Setelah penjabaran masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah, “Bagaimana Ancaman Perdamaian di Venezuela Akibat Kemerostan Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Maduro?”.

### Tinjauan Pustaka

Demokrasi memiliki makna yang beragam. Oleh Abraham Lincoln, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana rakyat turut memerintah melalui perantara wakilnya.<sup>19</sup> Menurut Sunarso, konsep demokrasi yang diimplementasikan oleh negara, pada umumnya tidak dilakukan langsung oleh rakyat. Pada tingkat nasional, wakil-wakil rakyat yang terpilih akan mewakili aspirasi rakyat melalui gagasan-gagasan yang mereka kemukakan.<sup>20</sup> Demokrasi jenis ini tergolong dalam praktik demokrasi tidak langsung. Demokrasi secara umum mampu diterima oleh banyak negara, karena ide utamanya yang menekankan pada perdamaian.

Perdamaian dalam demokrasi, telah dituliskan oleh Immanuel Kant dalam karyanya yang berjudul *Perpetual Peace* tahun 1795. Pada karyanya tersebut, Kant kemudian menciptakan serta menjabarkan gagasannya mengenai *democratic peace theory*. Ia menjelaskan pandangannya mengenai demokrasi yang berdasarkan pada perdamaian dunia.<sup>21</sup> Ia meyakini jika *republican constitution*, akan mampu membantu negara mencapai perdamaian. Contoh dari apa yang dimaksud Kant dengan *republican constitution* ialah, diberikannya kebebasan, pemerintahan yang representatif, terciptanya pemisahan kekuasaan (*trias politica*), dilakukannya perdagangan internasional, perdagangan bebas, serta disetujuinya berbagai perjanjian internasional.<sup>22</sup> Pandangan yang telah dikemukakan Kant, sering disebut sebagai *Kantian Triangle*. Maksudnya, perdamaian yang berkesinambungan akan mampu diwujudkan melalui tiga faktor utama, yakni: demokrasi; adanya ketergantungan antar negara; serta terlibatnya suatu negara ke dalam institusi internasional.<sup>23</sup> Menurut Kant, sistem *kantinian* merupakan nuansa di dalam sistem internasional yang beraromakan perdamaian dalam bingkai kerjasama. Kant mendambakan perdamaian abadi di dalam sistem internasional, dan ia percaya jika hal ini akan terwujud melalui sistem pemerintahan demokrasi. Pemikiran ini kemudian diberikan istilah sebagai *Perpetual Peace*.



<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Demokrasi,” [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/demokrasi), diakses 7 Januari 2021, <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

<sup>20</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, 12.

<sup>21</sup> Rizki Dian Nursita dan Surwandono Surwandono, “Gagasan Democratic Peace Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat,” *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017): 28.

<sup>22</sup> Garlan Archista Duarsa, “Analisis Teori Democratic Peace Pasca Perang Dingin” (Universitas Indonesia, 2014), 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Gambar 1. *Kantian Peace Triangle*<sup>24</sup>

Kant percaya apabila tiga faktor dalam *Kantian Triangle* saling melengkapi dan terkait maka perdamaian internasional akan mampu terwujud.<sup>25</sup> Pertama, mengenai demokrasi Kant menganggapnya sebagai kunci perdamaian. Keberhasilan demokrasi dapat diukur melalui tingkat akuntabilitas pemilu, akuntabilitas horizontal serta sosial akuntabilitas yang juga menjadi tolak ukur indeks demokrasi oleh banyak lembaga.<sup>26</sup> Kedua, ketergantungan antarnegara yang menurut Kant keberhasilannya dapat terwujud melalui kelancaran hubungan kerjasama dalam perdagangan internasional.<sup>27</sup> Ketiga, keterlibatan negara dalam organisasi internasional. Kant mengharapkan adanya keterlibatan serta kepatuhan negara terhadap organisasi internasional.<sup>28</sup> Terpenuhinya ketiga faktor tersebut dalam *Kantian Peace* dipandang akan mampu menciptakan keamanan melalui keadaan damai dan stabi antarnegara.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengimplementasikan ide serta gagasan yang telah diungkapkan oleh Kant. Adanya *democratic peace theory* yang merupakan pemikiran Kant, dipercaya Peneliti dapat menjadi alat analisa serta menjawab pertanyaan penelitian. Ketiga faktor yang ditetapkan dalam *Kantian Triangle*, akan dijadikan Peneliti sebagai alat analisis dalam menjabarkan pembahasan. Peneliti akan mendeskripsikan kondisi demokrasi di Venezuela, pada masa pemerintahan Maduro. Kemudian akan dijelaskan juga bagaimana hubungan ketergantungan Venezuela dengan negara-negara lainnya. Terkait keikutsertaan Venezuela di institusi internasional, juga akan Peneliti jabarkan dalam pembahasan. Dengan tiga faktor ini, Peneliti memandang dapat melakukan analisis yang menjawab pertanyaan penelitian.

Untuk memperdalam analisa dalam penelitian ini, digunakan tiga penelitian terdahulu. Pertama, Penelitian milik Kunkunrat dkk. yang bertujuan untuk menganalisa langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Maduro. Menggunakan teori pengambilan Keputusan Graham T. Allison, dideskripsikan bahwa Maduro menggunakan model proses keputusan berdasarkan kerja partai dalam membentuk sebuah kebijakan.<sup>29</sup> Keputusan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kondisi krisis negara hingga menyebabkan kegagalan dalam memperbaiki krisis. Selaras dengan hal tersebut, penelitian kedua yang dituliskan Dyn mengungkapkan gaya kepemimpinan Maduro telah menyebabkan krisis migrasi di Venezuela. Dyn menganalisa menggunakan metode Psikobiografi dan menjabarkan bahwa Maduro memiliki gaya kepemimpinan yang buruk. Demi mempertahankan kekuasaannya ia memaksakan skema kebijakan ekonomi yang dinilai tidak efektif hingga kecurangan dalam pemilu.<sup>30</sup> Hilangnya kemungkinan Venezuela keluar dari krisis menyebabkan 5,4 juta penduduk Venezuela telah meninggalkan negara tersebut.<sup>31</sup> Pada penelitian ketiga tulisan Novelia dkk, digunakan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri pemikiran Alex Mintz dan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan sikap Maduro sebagai pemimpin. Dinyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Maduro didasari oleh kepercayaan Maduro untuk bisa mengalahkan neoliberalisme Amerika Serikat serta ketidak mampuannya menemukan solusi alternatif lainnya.<sup>32</sup> Pada akhirnya, ia memilih kebijakan-kebijakan yang menyulitkan Masyarakat Venezuela.

<sup>24</sup> Alfiansyah, Latief, dan Taslim, "Perpetual Peace," 126.

<sup>25</sup> Hemalia Kusumadewi, "Questioning the Kantian Propositions: Explaining the Role of the United States as Democratic Peace Model in 21st Century," *Global Focus* 3, no. 2 (31 Oktober 2023): 170–71, <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2023.003.02.6>.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kunkunrat Kunkunrat, Ade Priangani, dan Astrid Aulia Monica, "Dinamika Politik dan Pemerintahan Venezuela di Bawah Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 111–17, <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.4335>.

<sup>30</sup> Dyn Anugerah, "Gaya Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro sebagai Penyebab Krisis Migrasi di Venezuela," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 13841–49, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4636/3912/8846>.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Novelia Revita Wahyuni Loppies, Laode Muhammad Fathun, dan Djoesep Harmat Tarigan, "Analisis Kebijakan Alba & PetroCaribe Nicolas Maduro Moros untuk Menghadapi Dominasi Politik Neoliberalisme Amerika Serikat di Venezuela pada 2015 - 2017," *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 2, no. 2 (2020): 70–79, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2362955&val=22734&title=ANALISIS%20KEBIJAKAN%20ALBA%20%20PETROCARIBE%20NICOLAS%20MADURO%20MOROS%20UNTUK%20MENGHADAPI%20DOMI>

Tiga penelitian terdahulu di atas sepakat bahwa kepemimpinan Maduro telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang memberatkan bagi situasi Venezuela. Maduro dipandang telah gagal dalam memulihkan kondisi ekonomi dan stabilitas politik negara. Ia juga dipandang melakukan berbagai tindakan yang menggugurkan nilai-nilai demokrasi. Pada penelitian-penelitian terdahulu, belum digunakan sudut pandang Immanuel Kant dalam menjabarkan bahaya yang disebabkan oleh pelemahan demokrasi, hilangnya ketergantungan dengan negara lain dan ketidaklibatan negara dalam organisasi internasional. Hal ini kemudian menjadi pembahasan yang menarik untuk dituliskan. Untuk itu, peneliti akan menggunakan *Kantian Triangle* sebagai alat Analisa dalam mendeskripsikan kondisi Venezuela yang mampu memberikan ancaman perdamaian selama pemerintahan Maduro.

## Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan teknis analisa kualitatif. Pada penelitian jenis ini, maka akan digunakan metode penjabaran dari data serta informasi yang telah diolah dan dikumpulkan sebelumnya. Selain itu, Peneliti akan menggabungkannya untuk kemudian disajikan dalam rangkaian kata yang saling berkaitan. Penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, serta masyarakat.<sup>33</sup> Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah, adanya ancaman perdamaian di Venezuela sebagai akibat dari kemerossotan demokrasi pada masa pemerintahan Maduro. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan sumber bacaan yang berkaitan dengan kemerossotan demokrasi di Venezuela masa pemerintahan Maduro. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui berbagai sumber laporan yang dipublikasikan oleh organisasi riset yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan termasuk ke dalam jenis data kuantitatif. Tujuan pengumpulan data secara berkala ialah untuk mengetahui perkembangan dari suatu keadaan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan membaca buku serta literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan kemerossotan demokrasi di Venezuela masa pemerintahan Maduro.

## Analisis

### Pengikisan Nilai-Nilai Demokrasi Pada Masa Pemerintahan Maduro

Hamid Basyaid dalam bukunya yang berjudul, “Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal”, menyatakan jika kebebasan adalah fondasi utama dalam berdemokrasi.<sup>34</sup> Partisipasi masyarakat menjadi persyarakatan wajib dalam instalasi demokrasi di suatu negara. Menurut Basyaid, demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan oleh Basyaid, ternyata spesifik dimaksudkan untuk kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu. Baik itu hak memilih, maupun hak untuk dipilih. Tanpa memandang agama, kelas sosial, serta *gender* seorang individu, mereka semua memiliki hak tersebut.<sup>35</sup> Berkaitan dengan pemilu, negara-negara demokrasi biasanya menerapkan sistem multipartai. Akan tetapi, tidak jarang partai-partai yang ada terbagi ke dalam kubu-kubu tertentu. Hal ini juga terjadi di Venezuela.

Terdapat dua kubu utama dalam partai politik Venezuela.<sup>36</sup> Kubu pertama ialah kelompok sayap kiri, dengan Partai Sosialis Venezuela (PSUV) sebagai partai utamanya. PSUV beraliansi dengan Partai *Fatherland for All* (PPT) dan Partai Komunis Venezuela (PCV). Kubu kedua yang merupakan lawan dari kubu pertama, ialah pihak oposisi. Mereka membentuk aliansi *Mesa de la Unidad Democratica* (MUD), yang beranggotakan Partai Era Baru (UNT) dan Partai *Movement toward Socialism* (MAS). UNT bersekutu dengan Proyek Venezuela, *Justice First*. Sejak tahun 2013 hingga

---

NASI%20POLITIK%20NEOLIBERALISME%20AMERIKA%20SERIKAT%20DI%20VENEZUELA%20PADA%20TAHUN%202015%20-%202017.

<sup>33</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, ketiga (PT. bumi Aksara, 2009), 48.

<sup>34</sup> Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*, 1 ed. (Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), 127.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> CNN Indonesia, “Kubu Pro-Kontra Rezim Venezuela Masih Duduki Kedutaan di AS,” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190508110730-134-392958/kubu-pro-kontra-rezim-venezuela-masih-duduki-kedutaan-di-as), 8 Mei 2019, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190508110730-134-392958/kubu-pro-kontra-rezim-venezuela-masih-duduki-kedutaan-di-as>.

saat ini, aliansi PSUV dan aliansi MUD menjadi kelompok yang terus saling memperebutkan kekuasaan di Parlemen Venezuela.

Melalui sanksi yang diberikan Amerika Serikat kepada Maduro di tahun 2014, pihak oposisi berhasil menemukan celah. Mereka memanfaatkan citra pemerintah Maduro yang jatuh, sebagai jembatan perebutan kekuasaan. Memenangkan pemilu Badan Legislatif yang di adakan pada tahun 2015, adalah tujuan sementara pihak oposisi pada saat itu. Mereka berhasil memenangkan suara dalam Majelis Nasional, dan mejadi mayoritas dalam lembaga tersebut. Kemenangan ini menjadi sangat berkesan, karena merupakan kemenangan pihak oposisi yang pertama dalam dua dekade terkahir.<sup>37</sup> Untuk itu, secara cepat pihak oposisi terus berupaya menggulingkan pemerintahan Maduro.

Maduro yang merasa terdesak dengan kekuasaan pihak oposisi di parlemen, kemudian mencoba berbagai cara untuk mengurangi tekanan yang ada. Pada bulan Maret 2017, Maduro melalui keputusan Mahkamah Agung menghapus Majelis Nasional.<sup>38</sup> Sebagai pihak yang dirugikan, pihak oposisi mengecam keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Mereka kemudian menyerukan aksi unjuk rasa bersama masyarakat. Demonstrasi besar dengan agenda penolakan pembubaran Majelis Nasional, akhirnya memaksa Mahkamah Agung untuk mencabut keputusannya beberapa hari kemudian.<sup>39</sup> Akan tetapi, Maduro masih belum menyerah. Ia kembali melakukan usaha yang dapat menjatuhkan pihak oposisi. Maduro mengumumkan pembentukan Majelis Konstituante, di mana pemilihan anggotanya akan dilaksanakan pada 30 Juli 2017.<sup>40</sup> Diketahui jika Majelis Konstituante, akan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan mampu memperkuat pemerintahan otoriter. Perusahaan pemungutan suara mengungkapkan, jika sebanyak 70% masyarakat Venezuela menentang hal tersebut.<sup>41</sup> Oleh karena itu, demonstrasi selama berbulan-bulan, terjadi pasca pengumuman Maduro. Tanpa memperdulikan protes rakyat, Maduro melakukan klaim sepihak atas kemenangan aliansi PSUV. Perebutan 545 kursi pada jabatan Majelis Konstituante, berakhir dengan diisiny seluruh kursi tersebut oleh orang-orang asal kelompok sayap kiri.<sup>42</sup>

Tepat tiga bulan setelah kegiatan pemilu Majelis Konstituante, dilakukan pemilihan Kepala Negara Bagian (Gubernur). Kali ini, sebanyak 62% suara dikumpulkan oleh aliansi MUD. Sementara itu, aliansi PSUV memperoleh 21% suara.<sup>43</sup> Kemenangan aliansi MUD, menandakan kuatnya pengaruh pihak oposis di Venezuela saat itu. Dukungan masyarakat, jelas menjadi kekuatan dibalik hal tersebut. Namun, kemenangan ini tidak berarti banyak bagi aliansi MUD. Melalui kecurangan hasil pemilu Majelis Konstituante, Maduro mendapatkan kekuasaan penuh. Ia kemudian memecat Luisa Ortega, yang merupakan Jaksa Agung.<sup>44</sup> Penyingkiran tokoh-tokoh opsisi dari perpolitikan Venezuela, serta melarang mereka maju dalam pemilu presiden tahun 2018.

Pemilu presiden tahun 2018, akhirnya diselenggarakan dengan diperbolehkannya pihak oposisi mengajukan calon mereka. Henri Falcon dari pihak oposisi melawan Nicolas Maduro pada pemilu tersebut. Namun, seperti yang diketahui, jika pemilu tidak sepenuhnya berarti. Perolehan 68% suara, telah membawa kemenangan yang ke-22 kalinya bagi aliansi PSUV.<sup>45</sup> Pemerintah Amerika Serikat

---

<sup>37</sup> Novi Christiastuti, "Setelah 16 Tahun, Partai Oposisi Venezuela Menang Pemilu Kalahkan Maduro," *detik.news.com*, 7 Desember 2015, <https://news.detik.com/internasional/d-3089878/setelah-16-tahun-partai-oposisi-venezuela-menang-pemilu-kalahkan-maduro>.

<sup>38</sup> Daniel Hellinger, "Menelaah krisis Venezuela: Kisah dua presiden," *theconversation.com*, 12 Februari 2019, <https://theconversation.com/menelaah-krisis-venezuela-kisah-dua-presiden-111547>.

<sup>39</sup> Arpan Rahman, "Venezuela Batalkan Pencabutan Kekuatan Legislatif Dewan Nasional," *medcom.id*, 2 April 2017, <https://www.medcom.id/internasional/amerika/4KZVD6JK-venezuela-batalkan-pemcabutan-kekuatan-legislatif-dewan-nasional>.

<sup>40</sup> Priyambodo, "AS tidak akui majelis konstituante Venezuela," *antaranews.com*, 2 September 2017, <https://www.antaranews.com/berita/644694/as-tidak-akui-majelis-konstituante-venezuela>.

<sup>41</sup> Arpan Rahman, "Hadapi Tuduhan Kecurangan, Presiden Venezuela Tunda Peluncuran Majelis Baru," *medcom.id*, 3 Agustus 2017, <https://www.medcom.id/internasional/amerika/GKdg89Xk-hadapi-tuduhan-kecurangan-presiden-venezuela-tunda-peluncuran-majelis-baru>.

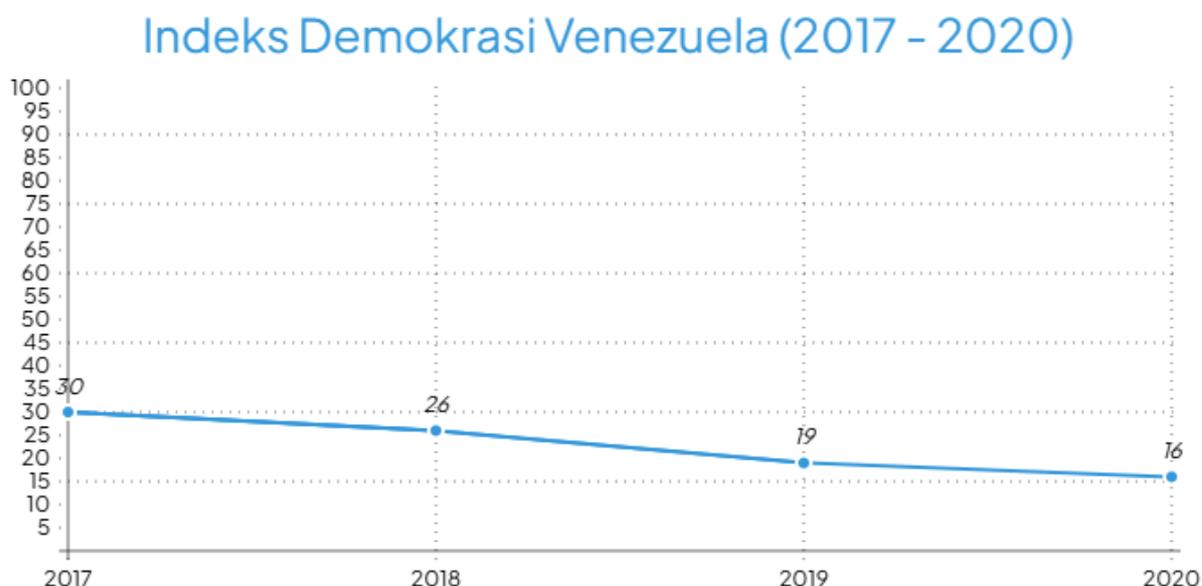
<sup>42</sup> VOA Indonesia, "Majelis Konstituante Venezuela Diresmikan di Caracas," *voaindonesia.com*, 5 Agustus 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/majelis-konstituante-venezuela-diresmikan-di-caracas/3973535.html>.

<sup>43</sup> VOA Indonesia, "Oposisi Venezuela Tolak Hasil Pilkada Nasional," *voindonesia.com*, 16 Oktober 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/oposisi-venezuela-tolak-hasil-pilkada-nasional/4072254.html>.

<sup>44</sup> VOA Indonesia, "Penasihat Keamanan: AS Tidak Mungkin Intervensi Venezuela," *voaindonesia.com*, 6 Agustus 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/penasihat-keamanan-as-tidak-mungkin-intervensi-venezuela/3974187.html>.

<sup>45</sup> Veronika Yasinta, "Nicolas Maduro Kembali Menangi Pemilu Presiden Venezuela," *internasional.kompas.com*, 21 Mei 2018, <https://internasional.kompas.com/read/2018/05/21/13332601/nicolas-maduro-kembali-menangi-pemilu-presiden-venezuela>.

menyebut pemilu Venezuela sebagai kepalsuan, dan mereka tidak akan mengakui hasilnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, Mike Pompeo, melalui akun *twitter* miliknya mengatakan, “Watching #Venezuela today. Shame elections change nothing. We need Venezuelan people running this country...”.<sup>46</sup>



Gambar 2. Indeks Demokrasi Venezuela Tahun 2017-2020<sup>47</sup>

Kekacauan dalam pemerintahan dan bidang politik, berakibat terhadap kemerosotan demokrasi di Venezuela. Melalui data dari *Freedom House*, maka diketahui jika indeks demokrasi di Venezuela terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dari 100 poin yang harus didapatkan, Venezuela memperoleh angka 30 poin.<sup>48</sup> Selanjutnya pada tahun 2018, angka yang diperoleh sebelumnya menurun, menjadi 26 poin dari 100.<sup>49</sup> Pada tahun 2019, Venezuela kembali mengalami penurunan indeks demokrasi, dengan didapaknya angka 19 poin dari 100.<sup>50</sup> Tahun berikutnya, yakni 2020 Venezuela kehilangan 3 poin, sehingga diberikannya 16 poin dari 100.<sup>51</sup> Hal ini menggambarkan situasi demokrasi yang sangat buruk di Venezuela. Dapat dikatakan jika pemilu, adalah satu-satunya hal yang memperlihatkan Venezuela sebagai sebuah negara demokrasi. Bahkan hal itu pun, sejak lama sudah tidak dapat dipercayai. Pemerintahan otoriter Maduro telah menghilangkan kebebasan rakyat dalam berpendapat dan berpolitik.

Terkait kebebasan, bukan hanya gerakan rakyat saja yang mengalami penekanan, tetapi kebebasan pers juga dibatasi. Menurut analisa *Reporters without Borders*, media independen dan para peliput berita berada di bawah pengendalian Maduro sejak pemerintahannya. Ketegangan bagi para jurnalis, semakin parah saat terjadinya krisis politik dan ekonomi di tahun 2016. Berdasarkan peringkat kebebasan pers pada tahun 2013 versi *Reporters without Borders*, Venezuela berada diperingkat 117 dari 180 negara.<sup>52</sup> Penurunan terus terjadi, hingga di tahun 2019 Venezuela berada di peringkat 148 dari 180 negara.<sup>53</sup> Hal ini menunjukkan jika pemerintahan Maduro, telah membatasi kegiatan media masa. Mereka tidak secara terbuka, menunjukkan kepada rakyat terkait situasi pemerintahannya.

Jadi, melalui penjabaran di atas diketahui jika situasi politik Venezuela semakin memburuk. Perebutan kekuasaan, berakhir dengan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh pemerintahan

<sup>46</sup> Yasinta.

<sup>47</sup> Freedom House, “Freedom in The World 2017: Venezuela,” *freedomhouse.org*, 2018, <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-world/2017>.

<sup>48</sup> Freedom House, “Freedom in The World 2017: Venezuela” (Venezuela, 2017).

<sup>49</sup> Freedom House, “Freedom in The World 2018: Venezuela” (Venezuela, 2018).

<sup>50</sup> Freedom House, “Freedom in The World 2019: Venezuela,” *freedomhouse.org* (Venezuela, 2019).

<sup>51</sup> Freedom House, “Freedom in The World 2020: Venezuela,” *freedomhouse.org* (Venezuela, 2020).

<sup>52</sup> Reporters Without Borders, “Venezuela: Ever More Authoritarian,” *rsf.org*, 2020, <https://rsf.org/en/venezuela>.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Maduro. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang kian mengikis, sehingga selalu menghadirkan hubungan yang menegangkan. Pemerintahan yang perlahan-lahan berubah menjadi otoriter, semakin mengikis nilai-nilai demokrasi di Venezuela. Dibungkamnya suara-suara rakyat, pendesakan terhadap pihak oposisi, kecurangan dalam berbagai pemilu, serta kebebasan pers yang dibatasi, telah menghadirkan kemerosotan demokrasi di Venezuel. Hal ini dibuktikan, dari nilai indeks demokrasi milik Venezuela yang semakin menurun setiap tahunnya.

### Hubungan antara Venezuela dengan Negara Lain

Ketergantungan ekonomi menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, merupakan kondisi yang dilengkapi dengan adanya hubungan timbal balik antara negara atau aktor berbeda yang berasal dari dalam negara.<sup>54</sup> Keduanya percaya, jika ketergantungan ekonomi pada akhirnya akan mengimplikasikan hubungan yang lebih kooperatif antar negara. Konsep yang dikemukakan keduanya memungkinkan adanya peran organisasi regional maupun internasional. Di mana akan ada aktor yang terdiri atas kumpulan negara-negara, mereka menyusun agenda, mendorong pembentukan koalisi dan kerjasama diberbagai bidang. Perlu digaris bawahi, jika apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan memperkuat stabilitas di dalam sistem internasional.<sup>55</sup> Melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan, maka kesalingtergantungan sangat mungkin terwujud. Hal ini juga mampu membentuk hubungan baik, sehingga menghadirkan perdamaian.

Ketergantungan ekonomi di Venezuela tidak di dasari pada perekonomian internasional. Menurut Akbar dan Lisma, dihilangkannya ketergantungan pada perekeonomian internasional di Venezuela, telah dilakukan sejak kepemimpinan Chavez.<sup>56</sup> Hal ini dilakukan Chavez, karena organisasi-organisasi tersebut dipandang terlalu kapitalistik dan bernuansa imperialis. Oleh karena itu, Chavez kemudian membentuk organisasi regional yang dapat meningkatkan perdagangan bebas di benua Amerika. Melalui *Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Americas* (ALBA), Chavez menyebarkan prinsip solidaritas antar bangsa-bangsa Amerika Latin dan Karibia.<sup>57</sup> Anggota organisasi tersebut adalah Antigua, Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Honduras, Nikaragua, Saint Vincent dan Grenada, serta Venezuela. Pada pembentukan ALBA di tahun 2004, Venezuela masih menjadi negara terkaya di Amerika Latin. Keinginan Chavez untuk lepas dari institusi perekonomian internasional, mendorong ALBA untuk membentuk lembaga kemitraan *Copensatory Funds of Structural Convergence*.<sup>58</sup> Tujuannya ialah untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat pembangunan serta menentukan mekanisme yang tepat bagi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sebagai negara dengan *Gross Domestic Product* (GDP) tertinggi diantara anggota ALBA lainnya, Venezuela bersama Ekuador, dan Kuba memberikan bantuan terbanyak. Bagi prinsip Bolivarianisme Chavez, hal ini tidak menjadi masalah asalkan ketergantungan kapitalis mampu dihilangkan.

Selain membentuk organisasi regional, Chavez merangkul negara-negara yang saat itu memiliki perekonomian yang berkembang pesat. Misalnya saja Rusia, China, Iran, dan Belarusia. Dukungan-dukungan penting mampu didapatkan Chavez, melalui hubungan tersebut. Melalui *Joint Investment Fund* bersama China, dana investasi sebesar US\$ 5 Milyar digucurkan untuk membiayai proyek infrastruktur, perkembangan sektor pertanian, energi, pertambangan, serta petrokimia.<sup>59</sup> Perusahaan minyak *Oil and Natural Gas Corporation* (ONGC) asal India dan perusahaan Petropars milik Iran, menjadi *partner* kerjasama Venezuela.<sup>60</sup> Selain itu, beberapa negara yang bersikap keras dalam menolak dominasi Amerika Serikat, juga dijadikan rekan bisnis Venezuela seperti Iran, Irak,

---

<sup>54</sup> Hendrini Renola Fitri dan Faisyal Rani, "Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013)," *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (6 Januari 2013): 935.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Akbar dan Risma Sandiarti, "Aliansi Strategis Venezuela dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," 1.

<sup>57</sup> Thomas Muhr, "Counter-Hegemonic Regionalism and Higher Education for all: Venezuela and the ALBA," *Globalisation, Societies and Education* 8, no. 1 (Maret 2010): 41, <https://doi.org/10.1080/14767720903574041>.

<sup>58</sup> Muhr, 48.

<sup>59</sup> Mutia Fauzia, "China Akan Berikan Pinjaman 5 Miliar Dollar AS kepada Venezuela," *ekonomi.kompas.com*, 14 September 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/14/064500526/china-akan-berikan-pinjaman-5-miliar-dollar-as-kepada-venezuela->.

<sup>60</sup> The Economic Times, "Venezuela Starts Clearing ONGC Videsh Ltd \$449 Million dues," *economictimes.indiatimes.com*, 2018, <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/making-travel-safer-for-each-other-uber-intercity-is-easing-people-into-longer-rides/articleshow/80150029.cms>.

Libya, dan Korea Utara.<sup>61</sup> Pada masa Chavez, kerjasama dengan China, Rusia, dan Iran yang merupakan lawan dari Amerika Serikat berkembang pesat.

Meskipun menghindari dominasi Amerika Serikat, tetapi Venezuela tidak dapat melawan fakta yang memperlihatkan ketergantungan negaranya dengan Amerika Serikat. Pada pemerintahan Chavez, diperkirakan sekitar US\$ 200 juta menjadi keuntungan setiap hari yang di dapatkan dari hasil ekspor minyak.<sup>62</sup> Lebih dari 50% dari hasil tersebut, berasal dari penjualan minyak ke Amerika Serikat.<sup>63</sup> Seperti yang diketahui, jika Amerika Serikat mempunyai kebutuhan minyak yang sangat besar. Pasokan impor minyak yang terbesar di Amerika Serikat berasal dari Kanada, Meksiko, Arab Saudi, Venezuela, dan Nigeria.

Baik pada masa pemerintahan Chavez maupun Maduro, keadaan dominasi sektor minyak bumi di Venezuela masih tetap sama. Sebesar 80% dari separuh pendapat negara di Venezuela berasal dari kegiatan ekspor minyak.<sup>64</sup> Sektor lain yang memberikan keuntungan lainnya, ialah sektor manufaktur dengan 17% keuntungan dari total ekspor di Venezuela. Selain itu, dari kegiatan pertanian diperoleh sekitar 3% dari total GDP Venezuela. Dengan demikian, sandaran ekonomi Venezuela telah berada disektor minyak. Hal ini juga memperlihatkan jika Amerika Serikat telah menjadi negara utama dalam ketergantungan ekonomi Venezuela. Dengan negara lainnya, jelas Venezuela juga hanya mengandalkan sektor minyak dalam kerjasama. Ia juga membiaya pembangunan bagi negara-negara anggota ALBA, melalui keuntungan dari sektor minyak. Saat di masa Chavez, ketergantungan ini mungkin tidak menimbulkan permasalahan yang berarti. Namun, di masa pemerintahan Maduro, dengan datangnya krisis harga minyak bumi maka perekonomian Venezuela mengalami guncangan hebat.

Tahun 2013 menjadi awal mula ketidakstabilan ekonomi di Venezuela. Pengalihan pemerintahan ke tangan Maduro yang tiba-tiba, dikarenakan meninggalnya Chavez menimbulkan gejolak internal. Hal ini diperparah dengan krisis turunnya harga minyak dunia, yang juga menyebabkan krisis bagi Venezuela. Saat itu, biaya produksi minyak yang lebih besar dari harga jualnya mengakibatkan penurunan jumlah produksi minyak di Venezuela. Lebih dari 90% keuntungan ekspor minyak, bahkan digunakan oleh pemerintah untuk membayar anggaran impor negara.<sup>65</sup> Untuk menutupi hutang luar negeri yang lebih besar dibandingkan pendapatan nasionalnya, Maduro memutuskan untuk mencetak banyak uang Bolivar. Hal ini menyebabkan nilai mata uang tersebut jatuh, dan menghambat pertumbuhan ekonomi Venezuela.

Kebijakan-kebijakan Maduro yang dipandang tidak tepat oleh masyarakat Venezuela, juga menciptakan permasalahan baru dengan para investor asing di sektor minyak. Untuk menghadapi krisis minyak, Maduro menetapkan kebijakan baru terhadap investor asing.<sup>66</sup> Melalui sudut pandang investor asing, kebijakan yang diberlakukan telah memberikan keuntungan besar kepada Venezuela. Pemerintah dalam rangka memperbaiki keadaan ekonomi Venezuela, mengontrol kegiatan perekonomian dengan ketat. Mereka membentuk badan pengatur pertukaran mata uang, sehingga kegiatan investasi harus dilakukan dengan menggunakan mata uang Bolivar. Pemerintah Venezuela juga menetapkan batas minimal investasi, serta memberikan banyak syarat bagi investor tanpa memberikan perlindungan hukum berdasarkan hukum domestik yang berlaku.

Kebijakan investasi yang diberlakukan oleh Maduro, secara tidak langsung telah mengecilkan keuntungan yang akan didapatkan oleh investor dibidang minyak. Maka dari itu, perubahan kebijakan yang diberlakukan telah membuat nilai investasi asing di Venezuela menurun. Investor asing memilih mundur atau tidak lagi melanjutkan investasi mereka di negara tersebut. Seperti yang dilakukan Perusahaan *Ford* dari Amerika Serikat, serta dua perusahaan minyak Venezuela *Surgutneftegaz* dan

---

<sup>61</sup> Hari Ariyanti, "Tanda-tanda Memudarnya Kekuatan Amerika di Berbagai Belahan Dunia," merdeka.com, 10 Juli 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/tanda-tanda-memudarnya-kekuatan-amerika-di-berbagai-belahan-dunia.html?page=4>.

<sup>62</sup> Gustidha Budiartie, "Tahun 2012, Harga Minyak Bisa US\$200 per Barel," bisnis.tempo.co, 4 Januari 2011, <https://bisnis.tempo.co/read/303509/tahun-2012-harga-minyak-bisa-us200-per-barel>.

<sup>63</sup> Hari Ariyanti, "Penasihat Trump Akui AS Incar Kekayaan Minyak Venezuela," merdeka.com, 31 Januari 2019, <https://www.merdeka.com/dunia/penasihat-trump-akui-as-incar-kekayaan-minyak-venezuela.html>.

<sup>64</sup> Cesar J. Alvarez dan Stephanie Hanson, "Venezuela's Oil-Based Economy," cfr.org, 2014, <https://www.cfr.org/backgrounder/venezuelas-oil-based-economy>.

<sup>65</sup> Agustiyanti, "Krisis dan Lilitan Utang Venezuela, Si Negara Kaya Minyak," cnnindonesia.com, 2 November 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171104204809-78-253511/krisis-dan-lilitan-utang-venezuela-si-negara-kaya-minyak>.

<sup>66</sup> United States Department of State, "2018 Investment Climate Statements: Venezuela," state.gov, 2018, <https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/venezuela/>.

Lukoil.<sup>67</sup> Hal ini semakin mempersulit keadaan ekonomi Venezuela. Keluarnya Venezuela dari *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF) di tahun 2007, membuat Venezuela tidak bisa mendapatkan pinjaman besar untuk melunasi hutang luar negeri dan memperbaiki perekonomiannya. Sebagai salah satu akibatnya, Maduro melepaskan saham Venezuela di Amerika *Citgo* kepada *Crystallex*. Venezuela tidak mampu melunasi hutang kepada Amerika *Citgo*, dan kalah dalam sengketa dengan *Crystallex*.

Subsidi kebutuhan masyarakat yang berasal dari pendapatan minyak, terus berkurang akibat krisis yang ada. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan keadaan politik di Venezuela, membuat perusahaan minyak *Petroleos de Venezuela S.A* (PDVSA) bangkrut. Akibatnya, krisis kemanusiaan di Venezuela mengalami peningkatan. Amerika Serikat telah menawarkan bantuan kepada Venezuela, akan tetapi Maduro tidak ingin membangun hubungan baik lebih banyak dengan Amerika Serikat. Ia percaya, jika Amerika Serikat datang membawa kepentingan lainnya dengan dalih kemanusiaan. Pemerintah Venezuela kemudian tidak lagi mampu membiayai impor bahan pokok, sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan dan bahan pokok. Harga bahan pokok yang mahal, membuat masyarakat miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Venezuela banyak mengalami kekurangan gizi, di masa pemerintahan Maduro. Menurut laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dikutip oleh Amalia, sebanyak 31,8 juta masyarakat Venezuela tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan makanan.<sup>68</sup> Pada *National Survey of Living Condition*, diketahui jika standar hidup di Venezuela telah mengalami penurunan setiap tahunnya. Sejak tahun 2016-2017, rata-rata masyarakat Venezuela kehilangan berat badannya hingga 8-11 kilogram.<sup>69</sup> Selain itu, kemenangan Maduro di tahun 2018, memicu eksodus masal yang meningkat hingga 3,4 juta pengungsi dan migran di awal tahun 2019.<sup>70</sup>

Negara anggota ALBA tidak dapat membantu Venezuela, ketika mereka sendiri juga masih mengalami kesulitan ekonomi. Lalu negara-negara yang menjalin kerjasama lainnya, seperti Belarusia, India, Irak, dan sebagainya juga tidak terlihat memberikan bantuan yang berarti. Hal ini terjadi karena ada kaitannya dengan kepentingan nasional. Hans J Morgenthau, sering mengaitkan hubungan antar negara melalui pemikiran realis yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Menurutnya, hubungan antara negara maju dengan negara berkembang akan berkaitan dengan keuntungan apa yang saling bisa diberikan.<sup>71</sup> Saat Venezuela mengalami keterpurukan ekonomi, sektor minyak yang menjadi ketergantungan negara itu tidak dapat lagi diandalkan. Pertimbangan lainnya, adalah tentang bagaimana Maduro memperlakukan para investor itu sendiri. Ketatnya peraturan yang perlu diikuti, tidak selaras dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Hanya Rusia dan China yang mendukung pemerintah Maduro, lewat bantuan dan investasi senilai miliaran dolar.<sup>72</sup> Hal ini jelas tidak terlepas dari persaingan keduanya dengan Amerika Serikat. Maduro yang tidak menyukai Amerika Serikat, selaras dengan keadaan dua negara pesaing tersebut.<sup>73</sup>

Maduro bukan hanya menjauh dari dunia internasional seperti Chavez, tetapi juga membangun *image* yang buruk di kawasan Amerika Latin. Negara anggota ALBA serta *partner* kerjasama Venezuela, juga memiliki alasan lain, untuk tidak mengambil langkah apapun terkait krisis di Venezuela. Mereka memandang jika Maduro tidak sejalan dengan langkah revolusi Chavez, apa yang dilakukan oleh Maduro bukan atas nama rakyat dan hanya berlandaskan kepentingan pribadinya. Tindakan otoriternya membuat banyak negara di dunia mengecam perbuatannya. Terutama saat adanya pelanggaran HAM di aksi-aksi demonstrasi. Seperti yang terjadi saat pemilu presiden tahun 2018. Laporan Ketua HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperlihatkan bahwa hampir 5.300 jiwa

<sup>67</sup> Christian Lowe dan Rinat Sagdiev, "Special Report: How Russia Sank Billions of Dollars into Venezuela Quicksand," *reuters.com*, 2019, <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-russia-rosneft-special-repo-idUSKCN1QV1HN>.

<sup>68</sup> Ashidiqi, "Pengaruh Idiosinkratik Nicolas Maduro Terhadap Penolakan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Dalam Krisis Venezuela," 136.

<sup>69</sup> Caracas Chronicles, "ENCOVI 2017: A Staggering Hunger Crisis, in Cold, Hard Numbers," *caracaschronicles.com*, 2018, <https://www.caracaschronicles.com/2018/02/21/encovi-2017/>.

<sup>70</sup> Poltak Patogi Nainggolan, "Krisis Venezuela dan Imigrasi Internasional," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no. 8 (September 2018): 11.

<sup>71</sup> Akbar dan Risma Sandiarti, "Aliansi Strategis Venezuela dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," 4.

<sup>72</sup> Andrea Comas, "Belasan Negara Uni Eropa Akui Presiden Sementara Venezuela Juan Guaido," *abc.net*, 5 Februari 2019, <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-02-05/belasan-negara-uni-eropa-akui-presiden-oposisi-venezuela/10780844>.

<sup>73</sup> Loppies, Fathun, dan Tarigan, "Analisis Kebijakan Alba & PetroCaribe Nicolas Maduro Moros untuk Menghadapi Dominasi Politik Neoliberalisme Amerika Serikat di Venezuela pada 2015 - 2017."

meninggal di tahun tersebut.<sup>74</sup> Pembunuhan ini dilakukan sebagai strategi Maduro, dalam membungkam pihak oposisi dan kelompok masyarakat yang menentang pemerintahannya. Eksodus masal yang disebabkan oleh terpilihnya kembali Maduro, juga didukung oleh 11 negara Amerika Latin. Mereka bersedia menampung para imigran, sekalipun paspor yang dimiliki telah kadaluarsa.<sup>75</sup>

Pasca kepemimpinan Chavez, hubungan baik lewat ketergantungan ekonomi di Venezuela sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Kebijakannya dalam menyelesaikan krisis lewat regulasi investasi asing, hanya mendatangkan masalah baru. Ditariknya berbagai investasi dari Venezuela, memperburuk keadaan perekonomian negara. Tidak dapat dipenuhinya subsidi untuk masyarakat, pelonjokan harga bahan pangan, rendahnya pendapatan masyarakat, hingga pelanggaran HAM yang terjadi, telah memperburuk *image* pemerintahan Maduro. Negara di dunia termasuk negara-negara anggota ALBA, telah mengecam apa yang dilakukan oleh Maduro. Meskipun dimasa lalu Chavez banyak membantu negara tersebut, akan tetapi ketidak sesuain sikap pemerintahan Maduro hanya menghadirkan sikap acuh saja. Bantuan kemanusiaan diberikan secara sewajarnya, tanpa bermaksud mendukung Maduro. Prinsip Bolivarianisme yang berusaha ditanamkan Chavez, dikikis sendiri oleh penurus pemimpin Venezuela, yakni Maduro. Venezuela dipandang tidak mampu membangun kerjasama yang menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, sikap serta kebijakan yang ditetapkan dimasa Maduro adalah masalah yang sesungguhnya, dalam menyebabkan tidak terbentuknya hubungan baik antara Venezuela dengan negara lainnya.

### **Aktifnya Keanggotaan Venezuela di dalam Institusi Internasional**

Venezuela keluar dari keanggotaan *World Bank* dan IMF, namun masih aktif dalam institusi internasional lainnya. Sejak 15 November 1945, Venezuela terdaftar sebagai anggota PBB. Hingga saat ini, Venezuela masih menjadi bagian dari organisais internasional tersebut. Meningkatnya kasus pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang melanda Venezuela, telah mendatangkan kepedulian dari anggota PBB. Pada bulan September 2018, lima negara Amerika Selatan meminta Mahkamah Internasional untuk mengusut tuduhan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Maduro.<sup>76</sup> Menyikapi kritik yang ada, Maduro melalui sidang PBB menyampaikan keberatannya. Ia menyatakan pemebelaaan diri, serta mengecam tuduhan dan kebijakan dari Amerika Serikat. Menurutnya, Amerika Serikat hanya menyampaikan tuduhan palsu yang menyudutkan pemerintahannya. Selain itu, sikap Amerika Serikat dinilai sebagai usaha pemberian perintah kepada dunia, yang seakan-akan adalah miliknya.

Menyikapi apa yang menjadi masalah di Venezuela, Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet berencana untuk melakukan investigasi ke Venezuela. Maduro memberikan pernyataan, bahwa Venezuela bersedia terbuka atas kunjungan yang akan dilakukan oleh Dewan HAM PBB. Pada Juli 2019, dikeluarkan laporan hasil investigasi yang telah dilakukan. Hasil tersebut menunjukkan jika terdapat pola penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Maduro, khususnya penangkapan dan penghilangan paksa, pembunuhan di luar pengadilan, serta kekerasan seksual. William Castilo yang merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela, menolak hasil laporan yang dipaparkan oleh Michelle Bachelet.<sup>77</sup> Ia mengatakan jika laporan itu tidak mencerminkan realitas di Venezuela. Sebelumnya, telah dijelaskan dalam laporan tersebut, jika data diperoleh berdasarkan wawancara bersama pejabat pemerintah, pihak oposisi, korban dan keluarganya, pihak pembela HAM Venezuela, serta kelompok lain yang relevan. Untuk mengungkapkan kebenaran lebih dalam, Dewan HAM PBB akan kembali melakukan investigasi.

Setahun berselang, pada bulan Oktober 2019 Venezuela terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Perolehan 105 suara, menetapkan Venezuela sebagai anggota dewan tersebut terhitung sejak bulan

---

<sup>74</sup> Ardi Priyatno Utomo, "Hampir 5.300 Orang Tewas di Venezuela karena 'Menentang Pemerintah,'" *internasional.kompas.com*, 5 Juli 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/07/05/10020971/hampir-5300-orang-tewas-di-venezuela-karena-menentang-pemerintah>.

<sup>75</sup> Dyah Ratna Meta Novia, "Di Venezuela Kami Kelaparan," *jawapos.com*, 2018, <https://www.jawapos.com/internasional/09/09/2018/di-venezuela-kami-kelaparan/>.

<sup>76</sup> Nur Aini, "Venezuela Siap Lawan Blokade AS Tahun Depan," *republika.co.id*, 16 Desember 2020, <https://republika.co.id/berita/qlfm11899107353/venezuela-siap-lawan-blokade-as-tahun-depan>.

<sup>77</sup> Nue Ani, "Venezuela Tolak Laporan Komisi HAM PBB tentang Kekerasan," *republika.co.id*, 6 Juli 2019, <https://www.republika.co.id/berita/puo37s366/internasional/amerika/19/07/06/71dc382-venezuela-tolak-laporan-komisi-ham-pbb-tentang-kekerasan>.

Januari 2020.<sup>78</sup> Kemenangan ini ditolak oleh berbagai pihak, terutama Amerika Serikat dan sejumlah kelompok penegak HAM internasional seperti *Human Right Watch*. Dunia mempertanyakan nasib korban yang sudah tak terhitung jumlahnya di negara tersebut. Untuk itu, Dewan HAM PBB menegaskan tanggung jawab mereka dalam memperkuat promosi serta perlindungan HAM. Guna memperlihatkan terjaganya sikap independen ke dalam situasi tertentu, Dewan HAM PBB sepakat untuk membentuk misi pencarian fakta internasional.<sup>79</sup> Misi ditetapkan di tahun yang sama dengan ditetapkannya Venezuela sebagai anggota Dewan HAM PBB. Misi tersebut bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM di Venezuela. Diharapkan akan terbuka jalan membaiknya keadaan HAM, melalui misi yang ada.

Ketegangan hubungan antar anggota PBB dengan Venezuela, semakin terasa ketika Amerika Serikat mendesak solusi politik untuk atasi krisis Venezuela.<sup>80</sup> Menurut mereka, PBB harus menggantikan Maduro dengan mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. Negara pesaing Amerika Serikat, yakni Rusia menyatakan keberatannya. Melalui kacamata mereka, Amerika Serikat tidak seharusnya memprovokasi dunia, untuk menggulingkan pemimpin yang terpilih secara sah. Belum lagi muncul dugaan, jika Juan Guaido merupakan penyambung tangan Amerika Serikat di Venezuela. Sebelumnya, telah terdapat tindakan yang terkoordinir oleh Amerika Serikat dan tujuh negara Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Maduro.<sup>81</sup> Mereka secara terang-terangan di awal Februari 2019, menyatakan mendukung dan mengakui pemerintahan Venezuela di bawah presiden oposisi, Juan Guaido. Pemilu presiden 2018 yang dianggap tidak sah, menyebabkan Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela.<sup>82</sup> Akibatnya, dunia terpecah ke dalam dua kubu. Ada kubu yang mendukung Maduro, ada pula kubu yang mengakui pemerintahan Juan Guaido.

Maduro memandang jika Juan Guaido merupakan penyambung tangan dari Amerika Serikat, yang akan merebut kendali minyak negara *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC). Selain PBB, Venezuela juga memiliki keanggotaan yang aktif di OPEC. Organisasi internasional tersebut berdiri sejak tahun 1949, dengan anggota sebanyak 21 negara. Venezuela merupakan salah satu pencetus berdirinya OPEC. Seperti yang disampaikan oleh Chavez, cadangan minyak di Venezuela mungkin akan habis sekitar 100 tahun lagi.<sup>83</sup> Hal ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah cadangan minyak yang ditemukan di Venezuela. Tahun 1999, cadangan minyak mentah di Venezuela hanya sekitar 76,8 miliar barel. Sedangkan di akhir tahun 2019, jumlah tersebut naik hingga menjadi 303,8 miliar barel.<sup>84</sup> Menurut data *Statiscal Review of World Energy 2020*, seperempat cadangan minyak dunia dimiliki Venezuela.<sup>85</sup> Meskipun memiliki cadangan minyak yang banyak, Venezuela sedang tidak dalam keadaan yang terlalu menguntungkan. Produksi minyak di Venezuela mengalami penurunan, akibat krisis ekonomi dan ketidakstabilan situasi politik. Hal ini kemudian mempengaruhi keuntungan dan melemahkan kedudukan Venezuela sebagai negara yang kaya akan minyak. Sehingga tidak mengherankan, jika ada pihak luar yang ingin menguasai cadangan minyak tersebut untuk dioptimalkan kegunaanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika Venezuela memiliki keaktifan di dalam institusi internasional. Akan tetapi, kepemimpinan Maduro yang otoriter dan kuatnya isu-isu kemanusiaan telah melahirkan pertentangan dari banyak negara. Selain itu, krisis ekonomi juga melemahkan peran Venezuela di OPEC akibat rendahnya produksi minyak. Untuk menyelesaikan krisis ekonomi serta

---

<sup>78</sup> Muhammad Syahranto, "Dapat 105 Suara, Venezuela Terpilih Duduk di Kursi Dewan HAM PBB," *wartaekonomi.co.id*, 2019, 1, <https://www.wartaekonomi.co.id/read252278/dapat-105-suara-venezuela-terpilih-duduk-di-kursi-dewan-ham-pbb?page=1>.

<sup>79</sup> Syahranto, 2.

<sup>80</sup> VOA Indonesia, "Pence Desak PBB Cabut Kredensial Venezuela," *voaindonesia.com*, 11 April 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/pence-desak-pbb-cabut-kredensial-venezuela/4871120.html>.

<sup>81</sup> Reuters, "Kelompok Eropa Desak Solusi Politik Atasi Krisis di Venezuela," *voaindonesia.com*, 8 Februari 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-eropa-desak-solusi-politik-atasi-krisis-di-venezuela-/4778112.html>.

<sup>82</sup> Hamsah, "Oposisi Ditangkap, Ini Pesan Istri Guaido Kepada Maduro," *fajar.co.id*, 24 Maret 2019, <https://fajar.co.id/2019/03/24/oposisi-ditangkap-ini-pesan-istri-guaido-kepada-maduro/>.

<sup>83</sup> Akbar dan Risma Sandiarti, "Aliansi Strategis Venezuela dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," 20.

<sup>84</sup> Lukas Hendra TM, "Punya Cadangan Minyak Mentah Terbesar Dunia, Produksi Minyak Venezuela Kalah Dari Indonesia," *ekonomi.bisnis.com*, 11 Desember 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201211/44/1329705/punya-cadangan-minyak-mentah-terbesar-dunia-produksi-minyak-venezuela-kalah-dari-indonesia>.

<sup>85</sup> Lukas Hendra TM.

krisis kemanusiaan di Venezuela, negara Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa mendorong pengangkatan pemimpin dari oposisi dan diturunkannya Maduro. Perdebatan antara negara yang mendukung Maduro, seperti Rusia, dengan negara yang kontra telah menghadirkan perpecahan antar anggota PBB.

### Ancaman Perdamaian di Venezuela Masa Pemerintahan Maduro

Perdamaian yang dapat diciptakan melalui *Kantian Triangle*, ternyata masih sulit diwujudkan oleh Venezuela. Pertama, terkait dengan demokrasi yang mengalami kemerosotan di Venezuela. Pemerintahan Maduro menghendaki rakyat untuk patuh, mengikuti peraturan negara yang dibuatnya. Ketika rakyat berusaha untuk menyampaikan aspirasinya, maka penghilangan serta pembunuhan secara paksa akan menjadi jalan penyelesaiannya.<sup>86</sup> Mereka yang tidak suka dan melawan pemerintah akan dibungkam, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM sangat mudah terjadi. Peliputan berita yang dibatasi, menyulitkan dunia untuk mengetahui fakta sebenarnya. Belum lagi hubungan tidak harmonis dengan pihak oposisi, yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Venezuela. Maduro menggunakan cara-cara curang untuk meletakkan kemenangan di atas tangannya.<sup>87</sup> Akibatnya, berbagai aksi demonstrasi sering dilakukan, meskipun selalu disertai tindakan kekerasan dari pemerintah. Secara perlahan, nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan Maduro semakin terkikis. Asas kejujuran yang telah tercoret, dilengkapi dengan pemerintahan yang tidak transparan, serta datangnya isu-isu kemanusiaan, telah mengarahkan Venezuela menjadi negara otoriter. Penurunan indeks kebebasan demokrasi adalah bukti, jika demokrasi di Venezuela saat ini telah mengalami kemerosotan.

Kedua, adanya hubungan buruk antara Venezuela dengan negara lain. Kant berharap jika dengan terjalinnya kesalingtergantungan akan mampu menciptakan damai melalui hubungan yang baik. Pada kenyataannya, Venezuela dimasa kepemimpinan Maduro memiliki hubungan yang tidak baik dengan sejumlah negara, terutama negara-negara Amerika Latin. Jika dilihat melalui *The Three Master Variable*, maka pada masa Chavez hal ini mampu terlaksanakan dengan baik. Saling ketergantungan yang menjadi faktor utama, dapat dipenuhi melalui hubungan baik dan kerjasama di dalam ALBA. Faktor kedua terkait persamaan nasib, semua anggota ALBA adalah negara berkembang yang cukup miskin sehingga dapat memahami kondisi negara satu dengan yang lainnya. Kemudian faktor ketiga yakni homogenitas, Chavez selalu menekankan prinsip kesamaan identitas Bolivarianisme. Apa yang telah dibangun Chavez, kemudian tidak dapat dilanjutkan di masa Maduro. Terlepas dari adanya krisis ekonomi, Maduro telah membangun kekuasaan otoriternya. Ia tidak mendengarkan rakyat, melupakan prinsip Bolivarianisme, serta menekan kebijakan investasi disektor minyak. Kesalahan langkah Maduro dalam menyikapi krisis ekonomi, hanya memperparah keadaan. Venezuela kehilangan beberapa investor asing, sehingga pemerintah kesulitan untuk membayar hutang luar negeri dan membiayai impor bahan pokok. Mahalnya harga bahan pokok, rendahnya pendapatan masyarakat, serta dihentikannya subsidi dari pemerintah, menghasilkan krisis kemanusiaan lainnya. Kurang gizi dan kelaparan melanda Venezuela selama bertahun-tahun. Kemenangan Maduro dalam pemilu 2018, semakin meningkatkan keputusan rakyat. Mereka memilih untuk keluar dari Venezuela, dan menjadi pengungsi di 11 negara Amerika Latin lainnya. Oleh karena itu, *image* buruk pemerintahan Maduro telah menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan Venezuela dengan berbagai negara di dunia.

Ketiga, terkait keikutsertaan Venezuela di dalam institusi internasional. Dapat dikatakan jika Venezuela aktif ikut serta dalam berbagai agenda PBB dan OPEC. Akan tetapi, pelanggaran peraturan serta pertikaian yang dibawa Maduro terus berlanjut. Berulang kali Amerika Serikat di dalam sidang PBB, mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan Maduro. Negara-negara Uni Eropa menyuarakan hal yang sama, sementara Rusia meminta Amerika Serikat untuk tidak ikut campur. Venezuela sendiri mengancam perbuatan Amerika Serikat, dan kooperatif dengan Dewan HAM PBB dalam usahanya mencari kebenaran di Venezuela. Meskipun demikian, Venezuela terus mengelak dari fakta-fakta yang dijabarkan melalui laporan dewan tersebut. Terpilihnya Venezuela sebagai anggota Dewan HAM PBB, menurut Peneliti telah memperburuk citra dari dewan tersebut. Sekalipun telah dijanjikan akan adanya pencarian fakta lanjutan di Venezuela, tetapi dengan adanya Venezuela di dalam dewan tersebut sama

<sup>86</sup> Ardi Priyatno Utomo, "Hampir 5.300 Orang Tewas di Venezuela karena 'Menentang Pemerintah,'" *internasional.kompas.com*, 5 Juli 2019, <https://internasional.kompas.com/read/2019/07/05/10020971/hampir-5300-orang-tewas-di-venezuela-karena-menentang-pemerintah>.

<sup>87</sup> Anugerah, "Gaya Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro sebagai Penyebab Krisis Migrasi di Venezuela."

saja dengan melupakan fungsi utamanya. Dewan yang seharusnya mempromosikan dan menjunjung HAM, memiliki anggota yang telah melanggar fungsi dari dewan itu sendiri.

Melalui penjabaran di atas, maka diketahui jika kondisi internal Venezuela menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman perdamaian. Demokrasi yang diharapkan dapat membawa perdamaian, nilai-nilainya telah terkikis. Bagi mereka yang mendambakan demokrasi, maka akan ada gerakan-gerakan yang melawan pemerintahan otoriter. Gerakan tersebut dikenal dengan istilah *civil society*, di mana adanya gerakan masa yang berasal dari masyarakat sipil di suatu negara. *Arab Spring* yang merupakan gelombang demokratisasi di Kawasan Timur Tengah, adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan kondisi tersebut. Masyarakat yang putus asa dengan keotoriteran pemerintah, berakhir dengan bersatu melawan rezim yang ingin mereka turunkan. Tunisia dan Mesir adalah contoh keberhasilan gerakan *civil society*. Hal yang sama dapat terjadi di Venezuela, di mana rakyat dapat melakukan gerakan untuk menggulingkan rezim Maduro.

Ancaman perdamaian akibat kondisi internal Venezuela, telah dipengaruhi oleh kemerosotan demokrasi. Situasi demokrasi yang menurun, menimbulkan ketidakstabilan politik di Venezuela. Hal tersebut juga berimbas kepada penurunan dibidang ekonomi. Melalui *Gallup Survey*, diketahui jika kondisi ekonomi yang sulit telah meningkatkan kejahatan di Venezuela. Sepanjang tahun 2017, sebesar 42% orang di Venezuela telah mengalami pencurian uang dan barang.<sup>88</sup> Menurut *Venezuelan Violence Observatory*, negara tersebut telah mengalami pelonjakan pembunuhan tertinggi di dunia. Hal ini menetapkan Venezuela sebagai negara yang berbahaya untuk ditinggali. Tingginya kejahatan serta pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah, menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Diketahui jika, hanya 17% orang di Venezuela yang merasa aman pulang di malam hari, sementara persentasi rata-rata negara di dunia ialah sekitar 68%.<sup>89</sup> Dengan demikian, ancaman perdamaian di Venezuela bukan hanya dikarenakan adanya aksi demonstrasi, tetapi juga aksi kejahatan yang semakin meningkat sebagai akibat dari kemerosotan demokrasi.

Selain kondisi internal yang tidak stabil, kondisi eksternal Venezuela juga tidak terlalu baik. *Image* buruk telah membangun hubungan tidak harmonis, antara Venezuela dengan sejumlah negara lain terutama Amerika Serikat. Maduro sejak awal tidak ingin membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat. Banyak bantuan kemanusiaan yang ditolak, aksi saling kecam juga mewarnai hubungan keduanya. Pada perkembangannya, hubungan tersebut diperparah ketika Amerika Serikat memberikan dukungan penuh kepada pihak oposisi, untuk menggantikan Maduro. Maduro percaya jika Juan Guaido, hanya akan dijadikan sebagai “pemimpin boneka” oleh Amerika Serikat. Hal ini kemudian mampu menjadi ancaman perdamaian bagi Venezuela. Pola-pola yang dilakukan Amerika Serikat dalam merebut cadangan minyak di banyak negara, selalu berulang. Amerika Serikat seperti yang telah dijelaskan dalam berbagai literatur bacaan, sering kali mengatasnamakan HAM dan demokrasi sebagai alat mereka dalam melaksanakan intervensi. Contoh, Intervensi NATO di Irak tahun 2003, intervensi Amerika Serikat bersama sekutunya di Afganistan dengan alasan kemanusiaan, dan aliansi Amerika Serikat bersama anggota NATO di Libya dalam penggulingan rezim Khadafi.<sup>90</sup> Besarnya kekayaan cadangan minyak di Venezuela, mungkin menjadi agenda Amerika Serikat kali ini. Dengan terus menyentuh isu kemanusiaan serta usaha penegakkan demokrasi lewat pemimpin dari pihak oposisi, Amerika Serikat bisa saja memiliki kepentingan lain. Saat ini, Amerika Serikat masih belum melakukan intervensi langsung ke Venezuela, jika hal tersebut sudah terjadi maka kemungkinan besar untuk terulangnya pola yang sama dari masa lalu akan semakin besar. Maka dari itu, hubungan buruk antara negara lain dengan Venezuela, kemudian mampu menimbulkan ancaman perdamaian di Venezuela.

## Kesimpulan

Masa kepemimpinan Maduro telah memperbesar kemungkinan adanya ancaman perdamaian di Venezuela. Pertama, Venezuela mengalami kemerosotan demokrasi, yang terjadi akibat terkikisnya nilai-nilai demokrasi di negara tersebut. Maduro membangun pemerintahan yang otoriter, melakukan

<sup>88</sup> Rory Smith, “Venezuela is World’s Most Dangerous Country Again, Poll Finds,” *edition.cnn.com*, 8 Juni 2018, <https://edition.cnn.com/2018/06/08/world/gallup-venezuela-most-dangerous-country-intl/index.html>.

<sup>89</sup> Smith.

<sup>90</sup> Margono, “Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 107, <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450>.

banyak kecurangan politik, serta melakukan tindakan pelanggaran HAM di Venezuela. Kedua, hubungan buruk antara Venezuela dengan sejumlah negara lainnya. Kebijakan investasi yang merugikan para investor, gagalnya Maduro memperbaiki keadaan politik dan ekonomi, serta meningkatnya isu-isu kemanusiaan di Venezuela, telah membentuk *image* buruk bagi pemerintahan Maduro. Hal ini kemudian berpengaruh ke dalam hubungan kerjasama dengan banyak negara lainnya. Ketiga, terkait keaktifan Venezuela di dalam institusi internasional. Sejak masa pemerintahan Chavez, Venezuela telah meninggalkan *World Bank* dan IMF, sehingga permasalahan ekonomi mereka saat ini tidak dapat dibantu oleh kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, Venezuela masih aktif di dalam kegiatan PBB dan OPEC. Saat ini, PBB masih terus mengumpulkan kebenaran dari pelanggaran HAM yang dilakukan Maduro. Oleh karena itu, meskipun menjadi anggota aktif PBB, Venezuela sesungguhnya telah banyak melanggar peraturan serta nilai-nilai yang menjadi prinsip organisasi tersebut. Tidak terpenuhinya aspek di dalam *Kantian Triangle* untuk menciptakan kondisi aman absolut dalam dunia internasional, menyebabkan kemungkinan adanya ancaman perdamaian. Untuk itu, Venezuela perlu mempercepat langkah dalam memperbaiki kondisi-kondisi yang penting. Seperti pembuatan strategi dalam mengatasi krisis ekonomi, membangun hubungan baik dengan negara lain, menghentikan krisis kemanusiaan, ikut serta menaati peraturan dan prinsip dari organisasi internasional yang diikuti, serta memulai penanaman nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Melalui cara-cara tersebut, mungkin saja ancaman perdamaian di Venezuela akan mampu teratasi.

### Daftar Pustaka

- Agustiyanti. "Krisis dan Lilitan Utang Venezuela, Si Negara Kaya Minyak." *cnnindonesia.com*, 2 November 2017. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171104204809-78-253511/krisis-dan-lilitan-utang-venezuela-si-negara-kaya-minyak>.
- Aini, Nur. "Venezuela Siap Lawan Blokade AS Tahun Depan." *republika.co.id*, 16 Desember 2020. <https://republika.co.id/berita/qlfm11899107353/venezuela-siap-lawan-blokade-as-tahun-depan>.
- Akbar, Hikmatul, dan Luh Risma Sandiarti. "Aliansi Strategis Venezuela dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi," 2018, 1–24.
- Alfiansyah, Iqbal Maulana, Mohammad Latief, dan Naqia Salsabila Taslim. "Perpetual Peace: An Analysis of Kant's Theory of Peace in Terms of The Islamic Worldview." *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 121–36. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4871/>.
- Alvarez, Angel. "Countries at the Crossroads 2011 - Venezuela," 2011.
- Alvarez, Cesar J., dan Stephanie Hanson. "Venezuela's Oil-Based Economy." *cfr.org*, 2014. <https://www.cfr.org/background/venezuelas-oil-based-economy>.
- Ani, Nue. "Venezuela Tolak Laporan Komisi HAM PBB tentang Kekerasan." *republika.co.id*, 6 Juli 2019. <https://www.republika.co.id/berita/puo37s366/internasional/amerika/19/07/06/pu71dc382-venezuela-tolak-laporan-komisi-ham-pbb-tentang-kekerasan>.
- Anugerah, Dyn. "Gaya Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro sebagai Penyebab Krisis Migrasi di Venezuela." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 13841–49. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4636/3912/8846>.

- Ariyanti, Hari. "Penasihat Trump Akui AS Incar Kekayaan Minyak Venezuela." *merdeka.com*, 31 Januari 2019. <https://www.merdeka.com/dunia/penasihat-trump-akui-as-incar-kekayaan-minyak-venezuela.html>.
- . "Tanda-tanda Memudarnya Kekuatan Amerika di Berbagai Belahan Dunia ." *merdeka.com*, 10 Juli 2019. <https://www.merdeka.com/dunia/tanda-tanda-memudarnya-kekuatan-amerika-di-berbagai-belahan-dunia.html?page=4>.
- Ashidiqi, Amalia Safira. "Pengaruh Idiosinkratik Nicolas Maduro Terhadap Penolakan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Dalam Krisis Venezuela." *Journal of International Relations* 6, no. 1 (2020): 135–43.
- Basyaib, Hamid. *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*. 1 ed. Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
- Budiartie, Gustidha. "Tahun 2012, Harga Minyak Bisa US\$200 per Barel." *bisnis.tempo.co*, 4 Januari 2011. <https://bisnis.tempo.co/read/303509/tahun-2012-harga-minyak-bisa-us200-per-barel>.
- Caracas Chronicles. "ENCOVI 2017: A Staggering Hunger Crisis, in Cold, Hard Numbers." *caracaschronicles.com*, 2018. <https://www.caracaschronicles.com/2018/02/21/encovi-2017/>.
- Christiastuti, Novi. "Setelah 16 Tahun, Partai Oposisi Venezuela Menang Pemilu Kalahkan Maduro." *detik.news.com*, 7 Desember 2015. <https://news.detik.com/internasional/d-3089878/setelah-16-tahun-partai-oposisi-venezuela-menang-pemilu-kalahkan-maduro>.
- Civicus Lens. "Venezuela's Opportunity for Democracy," 2024. <https://lens.civicus.org/venezuelas-opportunity-for-democracy/>.
- CNN Indonesia. "Kubu Pro-Kontra Rezim Venezuela Masih Duduki Kedutaan di AS." *cnnindonesia.com*, 8 Mei 2019. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190508110730-134-392958/kubu-pro-kontra-rezim-venezuela-masih-duduki-kedutaan-di-as>.
- Comas, Andrea. "Belasan Negara Uni Eropa Akui Presiden Sementara Venezuela Juan Guaido." *abc.net*, 5 Februari 2019. <https://www.abc.net.au/indonesian/2019-02-05/belasan-negara-uni-eropa-akui-presiden-oposisi-venezuela/10780844>.
- Dian Nursita, Rizki, dan Surwandono Surwandono. "Gagasan Democratic Peace Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat." *Journal of Islamic World and Politics* 1, no. 1 (2017): 27–39.
- Duarsa, Garlan Archista. "Analisis Teori Democratic Peace Pasca Perang Dingin." Universitas Indonesia, 2014.
- Economist Intelligence Unit. "Democracy Index 2023." EIU, 14 Februari 2024. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/>.
- Egan, Matt. "How US sanctions on Venezuela are Rippling Through Oil Markets." *CNN Business*, 19 Februari 2019. <https://edition.cnn.com/2019/02/19/investing/venezuela-oil-sanctions-pdvs/index.html>.
- Fauzia, Mutia. "China Akan Berikan Pinjaman 5 Miliar Dollar AS kepada Venezuela." *ekonomi.kompas.com*, 14 September 2018.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/14/064500526/china-akan-berikan-pinjaman-5-miliar-dollar-as-kepada-venezuela->.

Freedom House. "Freedom in The World 2017: Venezuela." Venezuela, 2017.

———. "Freedom in The World 2018: Venezuela." Venezuela, 2018.

———. "Freedom in The World 2019: Venezuela." *freedomhouse.org*. Venezuela, 2019.

———. "Freedom in The World 2020: Norway." *freedomhouse.org*, 2020. <https://freedomhouse.org/country/norway/freedom-world/2020>.

———. "Freedom in The World 2020: Venezuela." *freedomhouse.org*. Venezuela, 2020.

———. "Our Work in Venezuela." *freedomhouse.org*, 2017. <https://freedomhouse.org/country/venezuela>.

Hamsah. "Oposisi Ditangkap, Ini Pesan Istri Guaido Kepada Maduro." *fajar.co.id*, 24 Maret 2019. <https://fajar.co.id/2019/03/24/oposisi-ditangkap-ini-pesan-istri-guaido-kepada-maduro/>.

Hellinger, Daniel. "Menelaah krisis Venezuela: Kisah dua presiden." *theconversation.com*, 12 Februari 2019. <https://theconversation.com/menelaah-krisis-venezuela-kisah-dua-presiden-111547>.

House, Freedom. "Freedom in The World 2017: Venezuela." *freedomhouse.org*, 2018. <https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-world/2017>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. "Arti Kata Demokrasi." *kbbi.web.id*. Diakses 7 Januari 2021. <https://kbbi.web.id/demokrasi>.

Kunkunrat, Kunkunrat, Ade Priangani, dan Astrid Aulia Monica. "Dinamika Politik dan Pemerintahan Venezuela di Bawah Kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 111–17. <https://doi.org/10.23969/transborders.v4i2.4335>.

Kusumadewi, Hemalia. "Questioning the Kantian Propositions: Explaining the Role of the United States as Democratic Peace Model in 21st Century." *Global Focus* 3, no. 2 (31 Oktober 2023): 169–83. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2023.003.02.6>.

Loppies, Novelia Revita Wahyuni, Laode Muhammad Fathun, dan Djoesep Harmat Tarigan. "Analisis Kebijakan Alba & PetroCaribe Nicolas Maduro Moros untuk Menghadapi Dominasi Politik Neoliberalisme Amerika Serikat di Venezuela pada 2015 - 2017." *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* 2, no. 2 (2020): 70–79. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2362955&val=22734&title=ANALISIS%20KEBIJAKAN%20ALBA%20%20PETROCARIBE%20NICOLAS%20MADURO%20MOROS%20UNTUK%20MENGHADAPI%20DOMINASI%20POLITIK%20NEOLIBERALISME%20AMERIKA%20SERIKAT%20DI%20VENEZUELA%20PADA%20TAHUN%202015%20-%202017>.

Lowe, Christian, dan Rinat Sagdiev. "Special Report: How Russia Sank Billions of Dollars into Venezuela Quicksand." *reuters.com*, 2019. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-russia-rosneft-special-repo-idUSKCN1QV1HN>.

- Lukas Hendra TM. “Punya Cadangan Minyak Mentah Terbesar Dunia, Produksi Minyak Venezuela Kalah Dari Indonesia.” *ekonomi.bisnis.com*, 11 Desember 2020. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201211/44/1329705/punya-cadangan-minyak-mentah-terbesar-dunia-produksi-minyak-venezuela-kalah-dari-indonesia>.
- Margono. “Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional.” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, no. 2 (2015): 105–10. <https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.5450>.
- Muhr, Thomas. “Counter-Hegemonic Regionalism and Higher Education for all: Venezuela and the ALBA.” *Globalisation, Societies and Education* 8, no. 1 (Maret 2010): 39–57. <https://doi.org/10.1080/14767720903574041>.
- Nainggolan, Poltak Patogi. “Krisi Venezuela dan Imigrasi Internasional.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 10, no. 8 (September 2018): 7–12.
- Novia, Dyah Ratna Meta. “Di Venezuela Kami Kelaparan.” *jawapos.com*, 2018. <https://www.jawapos.com/internasional/09/09/2018/di-venezuela-kami-kelaparan/>.
- Nur, Syurya Muhammad. “Demokrasi dan Tantangannya dalam Bingkai Pluralisme di Indonesia,” 2019, 1–17.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Ketiga. PT. bumi Aksara, 2009.
- Placek, Kevin. “The Democratic Peace Theory,” 02 2012. <https://www.e-ir.info/2012/02/18/the-democratic-peace-theory/>.
- Priyambodo. “AS tidak akui majelis konstituante Venezuela.” *antaranews.com*, 2 September 2017. <https://www.antaranews.com/berita/644694/as-tidak-akui-majelis-konstituante-venezuela>.
- Rahman, Arpan. “Hadapi Tuduhan Kecurangan, Presiden Venezuela Tunda Peluncuran Majelis Baru.” *medcom.id*, 3 Agustus 2017. <https://www.medcom.id/internasional/amerika/GKdg89Xk-hadapi-tuduhan-kecurangan-presiden-venezuela-tunda-peluncuran-majelis-baru>.
- . “Venezuela Batalan Pencabutan Kekuatan Legislatif Dewan Nasional.” *medcom.id*, 2 April 2017. <https://www.medcom.id/internasional/amerika/4KZVD6JK-venezuela-batalan-pencabutan-kekuatan-legislatif-dewan-nasional>.
- Renola Fitri, Hendrini, dan Faisyal Rani. “Implementasi Kerjasama Sister City Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig (Tahun 2000-2013).” *Jurnal Transnasional* 5, no. 1 (6 Januari 2013): 931–44.
- Reporters Without Borders. “Venezuela: Ever More Authoritarian.” *rsf.org*, 2020. <https://rsf.org/en/venezuela>.
- Reuters. “Kelompok Eropa Desak Solusi Politik Atasi Krisis di Venezuela.” *voaindonesia.com*, 8 Februari 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kelompok-eropa-desak-solusi-politik-atasi-krisis-di-venezuela-/4778112.html>.
- Smith, Rory. “Venezuela is World’s Most Dangerous Country Again, Poll Finds.” *edition.cnn.com*, 8 Juni 2018. <https://edition.cnn.com/2018/06/08/world/gallup-venezuela-most-dangerous-country-intl/index.html>.

Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Syahrianto, Muhammad. "Dapat 105 Suara, Venezuela Terpilih Duduk di Kursi Dewan HAM PBB." *wartaekonomi.co.id*, 2019. <https://www.wartaekonomi.co.id/read252278/dapat-105-suara-venezuela-terpilih-duduk-di-kursi-dewan-ham-pbb?page=1>.

The Economic Times. "Venezuela Starts Clearing ONGC Videsh Ltd \$449 Million dues." *economictimes.com*, 2018. <https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/making-travel-safer-for-each-other-uber-intercity-is-easing-people-into-longer-rides/articleshow/80150029.cms>.

United States Department of State. "2018 Investment Climate Statements: Venezuela." *state.gov*, 2018. <https://www.state.gov/reports/2018-investment-climate-statements/venezuela/>.

Utomo, Ardi Priyatno. "Hampir 5.300 Orang Tewas di Venezuela karena 'Menentang Pemerintah.'" *internasional.kompas.com*, 5 Juli 2019. <https://internasional.kompas.com/read/2019/07/05/10020971/hampir-5300-orang-tewas-di-venezuela-karena-menentang-pemerintah>.

VOA Indonesia. "Majelis Konstituante Venezuela Diresmikan di Caracas." *voaindonesia.com*, 5 Agustus 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/majelis-konstituante-venezuela-diresmikan-di-caracas/3973535.html>.

———. "Oposisi Venezuela Tolak Hasil Pilkada Nasional." *voaindonesia.com*, 16 Oktober 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/oposisi-venezuela-tolak-hasil-pilkada-nasional/4072254.html>.

———. "Penasihat Keamanan: AS Tidak Mungkin Intervensi Venezuela." *voaindonesia.com*, 6 Agustus 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/penasihat-keamanan-as-tidak-mungkin-intervensi-venezuela/3974187.html>.

———. "Pence Desak PBB Cabut Kredensial Venezuela." *voaindonesia.com*, 11 April 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/pence-desak-pbb-cabut-kredensial-venezuela/4871120.html>.

Wibawa, Krisna Purwa Adi. "Pengaruh Ideologi Kiri Baru terhadap Perubahan Kebijakan Negara di Sektor Energi: Studi Kasus Venezuela." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2014): 295–345.

Xuetong, Yan. "Defining Peace: Peace vs. Security." *The Korean Journal of Defense Analysis*, 05 2009. <https://doi.org/10.1080/10163270409464062>.

Yasinta, Veronika. "Nicolas Maduro Kembali Menangi Pemilu Presiden Venezuela." *internasional.kompas.com*, 21 Mei 2018. <https://internasional.kompas.com/read/2018/05/21/13332601/nicolas-maduro-kembali-menangi-pemilu-presiden-venezuela>.